

DETERMINAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Oleh :

Henny Yulsiati^{1*}

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

Email : henny.yulsiati@polsri.ac.id

Romibil Maqruf²

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

Email : bilmaqruff@gmail.com

Co-Author : henny.yulsiati@polsri.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 29 Sept 2022

Direview : 18 Okt 2022

Disetujui : 28 Nov 2022

ABSTRACT

This examination expects to inspect the impact of nearby credit on the commonplace government. The example utilized in this examination was acquired utilizing the purposive testing strategy, so an example of 8 Commonplace Governments in Indonesia in 2015-2019 was gotten. The information utilized in this examination is auxiliary information. The investigation procedure utilized is numerous straight relapse examination. Information testing was done utilizing Eviews variant 10 programming. The aftereffects of the t-test showed that nearby income and general assignment supports had no impact on neighborhood credit. Capital Use has a positive and critical impact on territorial credit in the territories in Indonesia. The consequences of the F test show that the factors of territorial unique pay, general assignment assets, and capital consumptions together affect provincial credit in territories in Indonesia.

Keywords : **Regional Loans, Regional Original Income, General Allocation Funds, Capital Expenditure**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pinjaman pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dengan jumlah sampel yang banyak didistribusikan oleh delapan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia antara tahun 2015 dan 2019. Penelitian ini menggunakan sumber informasi data sekunder dan di evaluasi dengan *software Eviews* versi 10. Hasil Uji-t menunjukkan bahwa pinjaman Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh Belanja Modal. Pinjaman daerah pemerintah provinsi tidak terpengaruh oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Hasil uji F menunjukkan bahwa pinjaman daerah kepada pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh pendapatan daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal.

Kata kunci : **Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal**

PENDAHULUAN

Terbitnya pemberlakuan daerah otonom, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah mendapatkankewenangan untuk menjadi administrator mengelola daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah kewajiban yang di berikan pusat ke daerah sabagai hak daerah untuk mengukur dan memenuhi segala keperluan dan harapan masyarakat setempat berdasarkan dengan peraturan yang ada. Dengan di jadikannya dasar daerah otonom, daerah bisa memanfaatkan sumber-sumber pendapatan. Salah satunya pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pinjaman daerah ke provinsi-provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Kesanggupan tiap daerah berbeda-beda, tidak semua mempunyai pendapatan yang dapat menutupi kegiatan operasional.

Maka dari itu pemerintah pusat membuat sebuah solusi yaitu adanya dana alokasi umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan

bahwa dana alokasi umum tergolong dana yang diberikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan bagi semua daerah di Indonesia. berlakunya dana alokasi umum yang di harapkan dapat mengefesiensikan pengelolaan keuangan daerah.

Selain PAD dan DAU, Pemerintah Provinsi juga bisa menggunakan belanja modal, dimana belanja modal termasuk belanja yang dapat berupa aset mempunyai guna melebihi satu tahun (Halim, 2008: 101). PAD, DAU dan belanja modal pada pemerintah provinsi itu masing-masing berbeda tidak semua daerah mempunyai kesanggupan yang tergolong sama untuk antar daerah. Oleh karena itu daerah bisa melakukan pinjaman daerah untuk bisa mengoptimalkannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dijelaskan Pinjaman daerah termasuk penerimaan kegunaan atau uang yang dimanfaatkan oleh daerah yang bersangkutan akan dibebankan sebagai utang. Berdasarkan persentase realisasi penerimaan pada provinsi di Indonesia dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1 . Rata-rata persentase realisasipenerimaan pemerintah Provinsi di Indonesia 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	123,56%	99,97%	112,77%	101,14%	99,37%
Dana Pinjaman	100,97%	99,83%	96,16%	99,49%	98,15%
Pinjaman Daerah	50,13%	61,66%	31,44%	60,03%	71,95%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119,05%	83,14%	115,11%	110,24%	111,16%

Sumber : Data DJPK

Dilihat dari tabel diatas menampilkan data realisasi penerimaan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Khususnya terjadi kenaikan dan penurunan pada penerimaan realisasi pinjaman daerah. Kenaikan dan penurunan penerimaan pinjaman daerah tersebut mengindikasikan bahwa masih belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pinjaman daerah.

Dikutip dari laman *website* berita *online* kompasiana, Zhahwanda Anasty Prasadewi Mahasiswa S1 jurusan Perencanaan Wilayah

dan Kota Univesitas Jember 2019, menyampaikan pernyataannya mengenai pinjaman daerah termasuk pilihan untuk belanja mendirikan daerah. (*www. Kompa siana.com, 2020*), yaitu: "Sudah terlihat jelas APBD Anggaran nya sedikit. Kebanyakan digunakan untuk agenda rutin dan gaji ASN. Karena APBD dananya tidak banyak maka diperlukan pilihan sumber dana salah satu nya pinjaman daerah."

Berdasarkan uraian diatas pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik masalah yang sama yaitu belum

mengoptimalkan pinjaman daerah yang mempunyai kemampuan menutupi kekurangan kas dan juga bisa mendanai rencana-rencana daerah dalam meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Dengan bukti dasar tersebut penulis akan melakukan penelitian.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris bahwa secara parsial dan simultan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal berpengaruh terhadap pinjaman pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang cukup luas di dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sehingga bisa dijadikan sumber informasi bagi pemerintah daerah untuk mengelola Pinjaman Daerah

KAJIAN PUSTAKA

Pinjaman Daerah

Menurut Devas et.al.(1989:221): Pinjaman di perkenalkan dengan syarat untuk kebutuhan yang produktif sehingga bisa menambah penerimaan daerah dan bisa menutupi kekurangan kas daerah. Menurut Mahmudi (2010): Pinjaman daerah untuk susunan tertentu bisa mempunyai manfaat memperbaiki neraca, dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (Nasution, 2003): PAD hal yang dicari oleh masing-masing Pemerintah Daerah mengenai pengaturan yang mengawasi pengambilan sumber-sumber moneter tersebut. Menurut (Carunia, 2017: 119): Pendapatan asli daerah termasuk potensi yang ada dan dimanfaatkan dengan baik oleh daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah pengaruh terhadap pembangunan daerahnya semakin tinggi pula. Menurut (Baldric, 2017: 23): Pendapatan asli daerah identik dengan sebutan PAD adalah penerimaan yang ada di daerah dimanfaatkan berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Pendapatan daerah ini sendiri dapat dikatakan memiliki peranan begitu penting untuk kegiatan suatu daerah.

Dana Alokasi Umum

Bratakusmanto dan Solihin (2002: 183) (DAU) adalah sesuatu yang berfokus pada penyampaian dana provinsi yang tidak memihak,

termasuk substitusi adalah jaminan kesesuaian pelaksanaan koperasi spesialis mendasar ke daerah setempat, dan merupakan bagian penting dari rencana pengeluaran pendapatan dan penggunaan secara keseluruhan. dari kabupaten. Menurut Nordiawan (2017: 87) DAU tergolong dana yang diturunkan dari ditujukan ke daerah dengan maksud membantu kebutuhan daerah. Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:24) dana alokasi umum adalah pendapatan yang siap diberikan untuk mengurangi beban keuangan dimasing-masing daerah yang berasal dari APBN.

Belanja Modal

Nordiawan, (2017)Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentuyaitu untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.Menurut Erlina Rasdianto (2013:31): belanja modal termasuk biaya yang dikeluarkan melalui anggaran daerah, demi mendapatkan perolehan aset lebih dari satu tahun. Menurut Halim & Kusufi (2012:107) Belanja Modal adalah sebagai berikut : Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yangmemberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modaltermasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanjamodal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5)belanja fisik lainnya

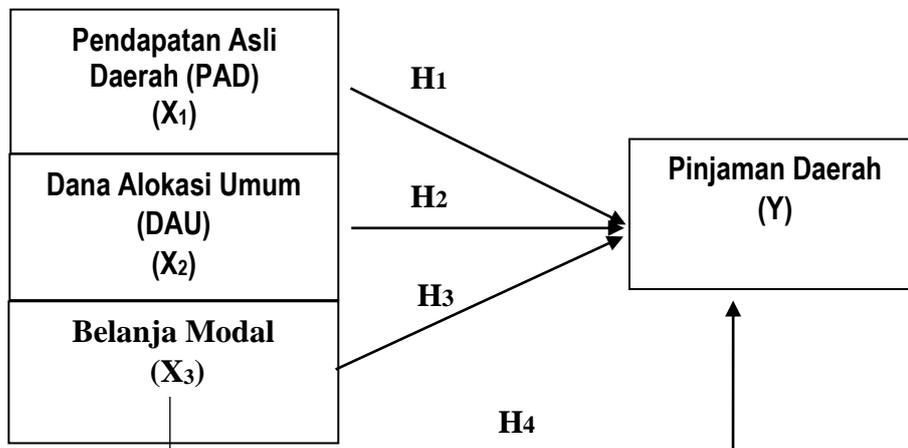
Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sumber pendapatan suatu daerah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pemerintah dan membangun daerahnya. Pendapatan Asli daerah mempunyai pengaruh terhadap pinjaman daerah. Bukti empris ini di temukan oleh Mulyono (2007) dan Taufikkurohman (2009).

Dana alokasi umum tergolong dana yang diberikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan bagi semua daerah di Indonesia. Dana alokasi umum mempengaruhi pinjaman daerah.Bukti empris ini di temukan oleh Mulyono (2007) dan Taufik kurohman (2009). Belanja Modal termasuk belanja aset yang mula dari anggaran yang diketahui dapat melebihi satu tahun.Belanja modal mempengaruhi pinjaman

daerah. Bukti empiris ini ditemukan oleh Mulyono (2007), Taufik Kurohman (2009), dan Muhammad

Bahril Ilmiddaviq (2018).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis adalah prediksi sementara mengenai masalah yang terjadi digunakan untuk menjawab kebenaran sesuai data yang ada. Hasil hipotesisnya yaitu:

- H₁ : PAD berpengaruh positif terhadap pinjaman daerah pemerintah provinsi di Indonesia
- H₂ : DAU berpengaruh positif terhadap pinjaman Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia
- H₃ : Belanja modal berpengaruh positif terhadap pinjaman pemerintah daerah Provinsi di Indonesia
- H₄ : PAD, DAU dan Belanja modal berpengaruh positif terhadap pinjaman pemerintah daerah provinsi di Indonesia

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini, Menggunakan objek Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan komponen dari metodologi penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada empat faktor utama yang terlibat dalam penelitian eksperimen: hipotesis, variabel bebas, variabel terikat, dan subjek. Dalam penelitian ini, hipotesis merupakan keputusan awal yang

dibuat oleh peneliti dan akan diuji. Ada 2 jenis penggunaan variabel di penelitian ini, yaitu Variabel Independen sering disinggung menjadi faktor peningkatan, indikator munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2019:69). Variabel Independen disimbolkan dengan huruf X. Variabel independen antara lain PAD (X₁), DAU sebagai (X₂), dan Belanja Modal sebagai (X₃). Variabel dependen sering disinggung sebagai variabel hasil, Standar, yang dihasilkan atau disebut variabel penyusun. Variabel yang dipengaruhi atau yang merupakan efek samping dari variabel otonom (Sugiyono, 2019:69). Pinjaman Daerah yang disimbolkan dengan huruf Y atau variabel dependen untuk penelitian ini.

Sugiyono (2017:80) Populasi adalah tempat yang dapat dikatakan mempunyai mutu dan sesuatu yang diminati oleh peneliti sehingga dipilih peneliti untuk di cari ilmu pengetahuannya. Penetapan untuk populasi penelitian ada 34 provinsi di Indonesia. Populasi penting ditentukan untuk dapat melihat data dipakai dalam sebuah penelitian.

Sampel merupakan pembagian dari populasi yang memiliki karakter khusus (Sugiyono, 2013). Pengumpulan komposisi populasi dilakukan untuk memenuhi sampel yang telah ditetapkan (Sanusi, 2019). Teknik menentui sampel dilakui dengan *Purposive sampling*.

Menurut (Sugiyono,2008): Menyatakan pencarian sampel yang di ambil dari penilaian-penilaian tertentu sebagai penelitian ilmiah. Provinsi yang melakukan Pinjaman Daerah dan tercatat dalam laporan realisasi APBD dan Neraca tahun 2015-2019 adalah sebanyak 8 provinsi.

Penelitian ini memakai strategi dokumentasi untuk carapengumpulan informasi.Dokumentasi identik dengan data sekunder yang didapatkan dari banyak sumber.Data yang semacam laporan keuangan yang telah ada di penelitian (Sanusi, 2016).

Teknik analisis data adalah menggambarkanmetode analisis apa yang akan dipakai peneliti dalam memeriksa data yang dikumpulkn dan menentukan apakah hasilnya

dapat diandalkan atau tidak. Metode analisis data yang dipakai penelitian ini adalah analisis regresi, dengan pemilihan model data panel dan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu dilaksanakan dengan menggunakan software EViews 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut hasil statistiknya menunjukkan nilai Y, X₁,X₂,X₃ dan besaran mean, besaran median, besaran maximum, besaran minimum, dan besaran Std.Dev.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	26.76775	28.07977	28.12523	27.73171
Median	26.56333	28.00621	28.03998	27.61047
Maximum	28.84882	30.59253	29.01692	28.78225
Minimum	24.84132	26.50030	27.67512	26.67902
Std. Dev.	0.856618	1.190702	0.346335	0.577057
Skewness	0.496870	0.720647	1.109957	0.322596
Kurtosis	3.164003	2.649177	3.545892	1.991388

Sumber: Data diolah, 2021

Pemilihan model data panel

Chow test

Berikut tabel 3 menunjukkan hasil Chow test

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation : Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.904533	(7,29)	0.1052
Cross-section Chi-square	15.129642	7	0.0344

Sumber: Data diolah, 2021

Penggunaan *Fixed Effect* Model telah terpilih pada *Chow Test* yang membandingkan *Common Effect* Model dan *Fixed Effect* Model. Lalu *Fixed Effect* Model diuji kembali dengan metode dimana terpilih *Random Effect* Model dengan menggunakan *Hausman Test*.

Hausman test

Berikut tabel di bawah ini menunjukkan hasil Hausman test

Tabel 4. Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Equation : Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic Chi-Sq.	d.f.	Prob.
Cross-section Random	0.509042	3	0.9169

Sumber: Data diolah, 2021

Dilihat tabel atas hasil uji Hausman test model yang tepat yaitu model *Random Effect Model*.

Lagrange Multiplier test

Berikut tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji LM

Tabel 5. Hasil uji LM test

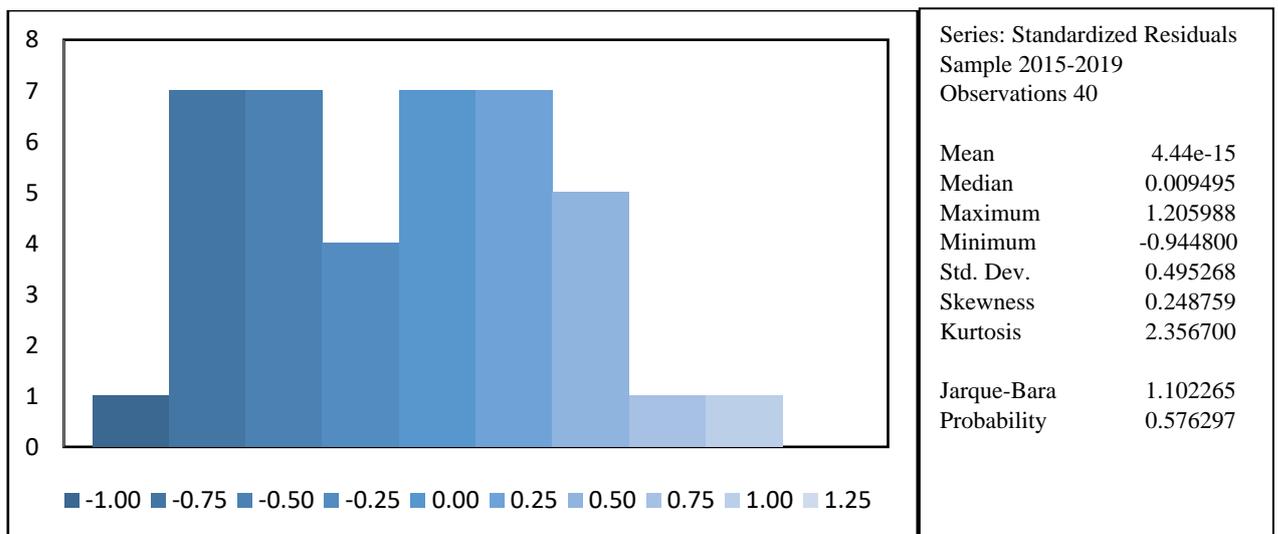
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses : No effects			
Alternative hypotheses : Two – sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.402538 (0.2363)	1.384847 (0.2393)	2.787385 (0.0950)

Sumber: Data diolah, 2021

Dilihat dari tabel diatas hasil uji LM model yang tepat yaitu model *Random Effects*. Maka dari itu hasil dari pemilihan model data panel harus pakai adalah *Random Effect* model.

Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

Berikut gambar dibawah ini menunjukkan hasil uji normalitas



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 2. Hasil uji Normalitas

Dilihat dari Gambar atas Hasil uji normalitas didapatkan angka *Jarque-Bera* 1.102265 dan Angka *probability* (*p-value*) 0.576297. Angka *probability* lebih dari α ($0.576297 > 0.05$), maka H_0 diterima, maka dapat dipastikan data berdistribusi normal.

Multikolinearitas

Berikut tabel 6 menunjukkan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.694016	0.623048
X2	0.694016	1.000000	0.576129
X3	0.623048	0.576129	1.000000

Sumber: Data diolah, 2021

Dilihat dari tabel 6 hasil ujinya tidak terjadi multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Berikut tabel dibawah menunjukkan hasil uji Heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test : Glejser			
F-statistic	1.567821	Prob.F (3,36)	0.2140
Obs*R-squared	4.622174	Prob. Chi-Square (3)	0.2016
Scaled explained SS	3.396745	Prob. Chi-Square (3)	0.3344

Sumber: Data diolah, 2021

Autokorelasi

Berikut tabel 8 menunjukkan hasil uji autokorelasi tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch –Godfrey Serial Correlation LM Test :			
F-statistic	2.223160	Prob.F (2,34)	0.1238
Obs*R-squared	4.626004	Prob. Chi-Square (2)	0.0990

Sumber: Data diolah, 2021

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.202727	7.866564	-1.042733	0.3040
X1	0.128472	0.104066	1.234528	0.2250
X2	0.169515	0.342381	0.495105	0.6235
X3	0.959024	0.189142	5.070401	0.0000

Sumber: Data diolah 2021

Berikut hasil Persamaan regresi linear berganda

$$Y = -8.202727 + 0.128472X_1 + 0.169515X_2 + 0.959024X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar -8.202727 menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan, apabila variabel Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal adalah 0 Rupiah, maka nilai Pinjaman Daerah bernilai negatif sebesar 8.202727

1. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai positif sebesar 0.128472 yang artinya bahwa setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,00 maka Pinjaman Daerah juga akan meningkat sebesar 0.128472 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
2. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum bernilai positif sebesar 0.169515

yang artinya bahwa setiap penambahan dana alokasi umum sebesar 1,00 maka pinjaman daerah juga akan meningkat sebesar 0.169515 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal bernilai positif sebesar 0.959024 yang artinya bahwa setiap penambahan belanja modal sebesar 1,00 maka pinjaman daerah juga akan meningkat sebesar 0.959024 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut tabel 10 menunjukkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R – squared	0.665723
Adjusted R-squared	0.637867
S.E. of regression	0.515491

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil koefisien determinasi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yaitu berikut ini:

1. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.665723. Koefisien determinasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel *independen*.
2. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan adalah 0.637867 artinya menunjukkan adanya kontribusi seluruh variabel *independent* dalam

menjelaskan variabel dependen sebesar 63,7%. Sisanya sebesar 36.3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

3. Nilai ukuran kesalahan prediksi adalah sebesar 0.515491 yang artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi pinjaman daerah sebesar 51%.

Uji Hipotesis

Uji t

Berikut table 11 menunjukkan hasil uji t

Tabel 11. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.202727	7.866564	-1.042733	0.3040
X1	0.128472	0.104066	1.234528	0.2250
X2	0.169515	0.342381	0.495105	0.6235
X3	0.959024	0.189142	5.070401	0.0000

Sumber: Data diolah, 2021

Dilihat dari table diatas hasil uji t. Diketahui nilai t tabel 2.02809. Hasil pengujian hipotesis uji parsial (uji t) dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian hasil uji t Pinjaman Daerah Dari *output* Eviews 10, variabel

Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki t hitung dengan nilai 1.234528 dan signifikansi nilainya 0.2250. Artinya, t hitung 1.234528 < t tabel 2.02809. Angka yang ada yaitu 0.2250 > 0.05, ini memperlihatkan tidak ada hubungan yang penting. Dengan bukti

- tersebut disimpulkan H_1 ditolak yang berarti PAD (X_1) tidak ada pengaruh terhadap Pinjaman daerah (Y).
2. Berdasarkan uraian uji t DAU Terhadap Pinjaman Daerah Dari *output* Eviews 10, variabel dana alokasi umum (X_2) memiliki t hitung dengan nilainya 0.495105 dan signifikansi nilainya 0.6235. Artinya, t hitung $0.495105 < t$ tabel 2.02809. Nilai signifikansi yang ada adalah $0.6235 > 0.05$, ini memperlihatkan tidak ada hubungan yang penting. Dengan bukti tersebut disimpulkan H_1 ditolak yang berarti variabel Dana alokasi umum (X_2) tidak ada pengaruh terhadap Pinjaman daerah (Y).
 3. Berdasarkan uraian uji t Belanja Modal Terhadap Pinjaman Daerah Dari *output* Eviews 10, variabel belanja modal (X_3) memiliki t hitung dengan nilai 5.070401 dan signifikansi nilainya 0.0000. Artinya, t hitung $5.070401 > t$ tabel 2.02809. Nilai signifikansi yang ada yaitu $0.0000 < 0.05$, ini memperlihatkan ada hubungan yang penting. Dengan bukti dapat disimpulkan H_1 diterima yang berarti variabel belanja modal (X_3) ada pengaruh baik dan penting terhadap Pinjaman daerah (Y).

Uji F

Berikut Tabel yang menunjukkan Hasil uji F

Tabel 12. Hasil Uji F

R – squared	0.665723
Adjusted R-squared	0.637867
S.E. of regression	0.515491
Sum squared resid	9.566324
Log likelihood	-28.14493
F-statistic	23.89842
Prob (F-statistic)	0.00000

Sumber: Data diolah, 2021

Dilihat dari tabel di atas, didapati hasil uji statistik F diketahui F hitung sebesar 23.89842. Diketahui nilai F tabel, diketahui 3.26.

Hasil Uji F untuk H_0 diperoleh hasil F hitung nilainya 23.89842 dengan signifikansi nilainya 0.000000. Hal ini berarti F hitung $23.89842 > F$ tabel 3.26 dan tingkat signifikansi $0,000000 < 0,005$ ($\alpha = 0,05$). Dengan bukti tersebut disimpulkan bahwa H_4 diterima yang artinya PAD, DAU, dan Belanja Modal secara signifikan mempengaruhi Pinjaman Daerah.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap pinjaman daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pinjaman pemerintah daerah Provinsi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saragih (2003:55) menyatakan PAD merupakan andalan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pinjaman daerah karena tingginya sumber daya yang dimiliki daerah membuat daerah mampu memenuhi kebutuhannya yaitu melalui pendapatan asli daerah yang ada, Pemerintahan Daerah yang tidak memiliki jumlah PAD yang tinggi, tidak akan berani mengambil kebijakan Pinjaman Daerah karena PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah yang kuat sebagai sumber pendanaan daerah yang mengindikasikan kemandirian daerah

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahril Ilmiddaviq (2018) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pinjaman daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang disampaikan oleh Mulyono (2007) yang menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah ada pengaruh terhadap pinjaman daerah. Hal ini menunjukkan PAD akan menjadi salah faktor yang penting untuk mengurangi dana yang didapatkan dari pemerintah pusat, dan mampu menjalankan pemerintahnya sendiri secara mandiri. Berdasarkan data perhitungan memperlihatkan penerimaan pendapatan asli daerah tidak menjadi pengaruh munculnya pinjaman daerah.

Pengaruh Dana alokasi umum terhadap pinjaman daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dana alokasi umum secara parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pinjaman pemerintah daerah Provinsi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Jurnal Penelitian eksplorasi akuntansi oleh syofyan yuliantoni. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pinjaman daerah karena ketika sesuai dengan fungsi dana alokasi umum itu sendiri yaitu dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Maka tidak perlu melakukan pinjaman daerah ketika DAU memenuhi kebutuhan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramiana Cahya Surya (2016)

Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi tidak lagi mengandalkan DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat sebagai sumber kas untuk mendukung pembangunan daerah, sehingga rendahnya nilai DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak berpengaruh pada belanja daerah atau pembangunan daerah (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>). Selain itu, pemerintah provinsi telah memanfaatkan secara tepat dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah ke daerah-daerah yang digunakan sebagai sektor-sektor produktif yang dapat

memberikan peran serta yang signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pinjaman Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman daerah pemerintah Provinsi di Indonesia. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Pembelanjaan yang dimaksud berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja jalan dan irigasi, maupun dalam bentuk fisik lainnya. Untuk memenuhi belanja tersebut, dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan jika tidak diimbangi dari sisi penerimaan maka pemerintah daerah akan mencari sumber pembiayaan yang lain berupa Pinjaman Daerah

Penelitian ini satu pemikiran dengan penelitian yang disampaikan oleh Muhammad Bahril Ilmiddaviq (2018) yang memperoleh hasil belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pinjaman daerah. Selanjutnya penelitian yang didapatkan Mulyono (2007) dan Taufik kurrohman (2009) menemukan hasil yang sama belanja modal berpengaruh terhadap Pinjaman daerah. Artinya Pemerintah Provinsi yang mempunyai belanja modal yang besar dan tidak didampingi dengan sisi penerimaan yang juga besar maka pemerintah daerah akan mencari sumber pendapatan lain salah satunya pinjaman daerah.

Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal terhadap Pinjaman Daerah

Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah, tetapi secara simultan dengan variabel Belanja Modal, berpengaruh. Karena untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, membutuhkan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang akan di penuhi melalui Belanja Modal. Demikian juga Dana Alokasi Umum yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dimana Dana Alokasi Umum yang juga digunakan untuk pembiayaan infrastruktur tidak terpenuhi, dengan adanya Belanja Modal maka akan di penuhi melalui Pinjaman Daerah.

Hasil penelitian ini di dukung peneliti Mulyono (2007) dan Muhammad Bahril Ilmiddaviq (2018), bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah

KESIMPULAN

Dari uraian hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PAD tidak berpengaruh terhadap pinjaman daerah. Dengan kata lain setiap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tidak akan munculnya dana pinjaman daerah.
2. DAU tidak berpengaruh terhadap pinjaman daerah. Dengan kata lain tiap ada kenaikan besaran dana alokasi umum tidak mempengaruhi pinjaman daerah.
3. Belanja modal ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pinjaman daerah. Dengan kata lain ketika meningkatnya belanja modal maka akan diikuti dengan besarnya penerimaan pinjaman daerah.
4. PAD, DAU, belanja modal simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pinjaman daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa PAD meningkat, DAU meningkat dan belanja modal juga meningkat, maka dapat meningkatkan pinjaman pemerintah daerah Provinsi di Indonesia.

Rekomendasi

Dengan kesimpulan sudah ditetapkan, para peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi diharapkan untuk dapat memaksimalkan pendapatan melalui peningkatan DAU dan belanja untuk proyek-proyek modal, serta meningkatkan pendapatan daerah (yang merupakan sumber pendapatan utama provinsi). Otonomi keuangan dan berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat I

adalah dua tujuan yang dapat dicapai melalui penggunaan pinjaman daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan studi yaitu dapat lebih memahami bagaimana pemerintah provinsi memanfaatkan pinjaman daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ukuran sampel mereka untuk memasukkan administrasi provinsi tambahan untuk mengidentifikasi perbedaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih banyak menggunakan variabel yang berpotensi mempengaruhi pinjaman daerah ditambahkan untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi.(2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Baldric Siregar 2017, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bratakusumah dan Solihin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Devas, Nick. al.1989.(Peny.).*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian
- Halim, Abdul. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ilmiddaviq Muhammad Bahril, 2018 "Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah Pada

- Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur". *unim*. Volume 1, Nomor 2
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 BPK RI. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- Mulyono, 2007. Aspek- aspek Kuantitatif Yang Mempengaruhi Kebijakan Pinjaman daerah (Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur). *TEMA*, Vol.8, No.2
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nordiawan.D, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Rokhedi P. Santoso. 2003 "Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Daerah Istimewa Jogjakarta" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 No. 2. hlm. 147-158
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sanusi, Anwar (2019), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alphabet
- Sudarnan, dkk 2018. "Analisis Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Kutai Karta-Negara" *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi* Vol.1, No. 1. .
- Tri Basuki, Agus. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews*. Jakarta: Rajawali Pers.2014. .
- Taufik Kurrohman, 2009 "Determinan Pinjaman Kebijakan Daerah Studi Kasus Di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Akuntansi dan bisnis* Vol.9, No. 2.
- Verawaty Abdullah, Imran R. Hambali, Hj. Valentina Monoarfa, 2013 "Analisis Defisit Anggaran Pemerintah Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah di Kota Gorontalo (Periode 2006 - 2013)" *Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo*.
- Yerimias Manuhutu, Desry J. Louhenapessy. 2013 "Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Dan Variable-Variable Makro Ekonomi
- [UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \[JDIH ...](#)
- <https://peraturan.bpk.go.id> > Home > Details > uu-no-2
- Yang Mempengaruhinya Di Kota Ambon" *Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura* Vol. VII, No. 1. ISSN: 1978-3612.